

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)  
DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TAHUN 2014-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**FAHMI CANDRA GUNTARA**

**B200150154**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## **PERSETUJUAN**

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran (SILPA) di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2014-2017**

## **PUBLIKASI ILMIAH**

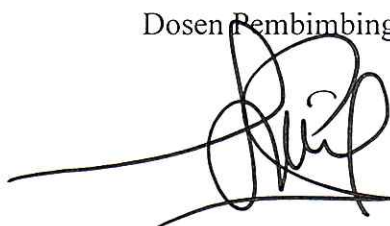
Oleh:

**FAHMI CANDRA GUNTARA**

**B 200 150 154**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andy Dwi Bayu Bawono', written over a horizontal line.

**Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D**

**NIDN: 977 / 0621017901**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2014-2017**

Yang ditulis oleh:

**FAHMI CANDRA GUNTARA**

**B 200 150 154**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 25 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Eko Sugiyanto., M.Si  
(Anggota I DewanPenguji)
3. Drs. M. Abdul Aris., M.Si  
(Anggota II DewanPenguji)

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
**Dr. H. Syamsudin, MM.**  
NIK. 19570217

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Februari 2020

Penulis



Fahmi Candra Guntara

B200 150 154

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TAHUN 2014-2017**

## **Abstrak**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Desentralisasi adalah pengalihan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah, semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Pengalihan wewenang menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan orang-orang yang tinggal di daerah mereka sendiri untuk mengatur dan mengelola kepentingan mereka sendiri. Sasaran ekonomi yang ingin dicapai melalui desentralisasi adalah adanya sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, pengeluaran modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa sisa pembiayaan anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa pada 2014-2017. Metode yang digunakan teknik *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 98 laporan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, dana alokasi khusus, dan penerimaan pembiayaan mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,000; 0,000; dan 0,000. Sementara itu, pendapatan retribusi daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,419 dan 0,120.

**Kata kunci:** Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Penerimaan Pembiayaan, Otonomi Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

## **Abstract**

According to Law Number 5 of 1974 Decentralization is the transfer of government affairs from the center to the regions. Delegation of authority to regional governments, solely to achieve efficient governance. Transfer of authority results in autonomy. Autonomy itself is the freedom of people who live in their own area to regulate and manage their own interests. The economic goal to be achieved through decentralization is the existence of a decentralized system, the Central Government delegating financial management authority to the Regional Government. Therefore, the purpose of this study is to examine the empirical evidence about the effect of local tax revenue, regional retribution, special allocation funds, capital expenditures, and financing receipts on the

remaining balance of budget financing. This type of research used in this study is quantitative. The population used in this study were districts / cities in Java in 2014-2017. The method used was purposive sampling technique, with a total sample of 98 district / city financial statements. The method of analysis uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that regional tax revenues, special allocation funds, and financing revenues affect the remaining excess budget financing with a sig value of 0,000 each; 0,000; and 0,000. Meanwhile, regional retribution income and capital expenditure did not affect the rest of the budget financing with sig values of 0.419 and 0.120, respectively.

**Keywords:** Regional Tax Revenue, Regional Retribution, Special Allocation Funds, Capital Expenditures, Financing Revenues, Regional Autonomy, Remaining Budget Financing.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk adanya reformasi ialah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 dan direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah (Bawono, 2008).

Perubahan lebih lanjut tentang sistem tata pemerintahan menjadi desentralisasi diatur dalam tiga paket perundangan, yaitu; UU No 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang

tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Adapun tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah dengan adanya sistem desentralisasi maka Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan begitu, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana untuk peningkatan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Sistem desentralisasi juga merupakan bentuk usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi juga akan membantu pemerintah daerah untuk menyusun berbagai program dalam upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, yang semua itu untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori yang melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Sugiyono (2012). Populasi pada penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota pulau Jawa pada tahun anggaran 2014-2017. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiyono (2012). kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling*.

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan skala pengukuran yang bersifat metrik (interval atau rasio) analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan pajak daerah, dana alokasi khusus, belanja daerah, penerimaan pembiayaan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran, dengan model regresi sebagai berikut :

$$\text{SILPA} = \alpha + \beta_1\text{PPD} + \beta_2\text{RD} + \beta_3\text{DAK} + \beta_4\text{BM} + \beta_5\text{PP} + e$$

Dimana :

SILPA : sisa lebih pembiayaan anggaran

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  : koefisien variabel independen

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

BM : Belanja Modal

PP : Penerimaan Pembiayaan

e : error term

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

##### 3.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *Central Limit Theorem*. Menurut Gujarati (2006), teorema limit sentral ditunjukkan jika ada sejumlah besar variabel acak yang didistribusikan secara independen dan identik, maka dengan beberapa pengecualian (salah satu pengecualian adalah distribusi probabilitas Cauchy yang tidak mempunyai nilai rata-rata ataupun varians), distribusi dari jumlah variabel acak tersebut cenderung ke arah distribusi normal apabila jumlah variabel semacam itu bertambah sampai tak terhingga. Dalam praktiknya, tak peduli



distribusi probabilitas apapun yang mendasari, rata-rata sampel dari besaran sampel yang terdiri dari lebih dari 30 observasi, maka akan mendekati normal.

### 3.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model Multikolinearitas (Ghozali 2011:105). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Uji Multikolinearitas Data

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Pendapatan Pajak Daerah	0,419	2,387	Bebas Multikolinearitas
Pendapatan Retribusi Daerah	0,468	2,136	Bebas Multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	0,887	1,128	Bebas Multikolinearitas
Belanja Modal	0,589	1,697	Bebas Multikolinearitas
Penerimaan Pembiayaan	0,713	1,402	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2019

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan

uji *Rank Spearman-Rho*. Uji *Rank Spearman-Rho* dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. Uji *Rank Spearman-Rho* dapat ditunjukkan dalam table 2.

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>p-value</i>	Keterangan
Pendapatan Pajak Daerah	0,303	Bebas Heterokedastisitas
Pendapatan Retribusi Daerah	0,958	Bebas Heterokedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,599	Bebas Heterokedastisitas
Belanja Modal	0,950	Bebas Heterokedastisitas
Penerimaan Pembiayaan	0,071	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.4 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p value* > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Pada pengujian autokorelasi, peneliti menggunakan run test yang merupakan salah satu pengujian untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari signifikansi uji durbin watson, dimana jika hasil pengujian menunjukkan  $d > dL$  dan  $(4-dU) > dU$  maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV. 5.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,769 <sup>a</sup>	,591	,586	,513065	1,916

Sumber: Data Olah, 2019

Hasil uji dapat dilihat bahwa nilai  $dL = 1,7176$  dan  $dU = 1,8199$  sehingga  $1,916 > 1,7176$  dan  $(4-1,8199) > 1,8199$ . Kesimpulannya, tidak terjadi autokorelasi dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 21 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten/kota se-Jawa tahun 2014-2017.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel		Koefisien Regresi	T <sub>hitung</sub>	Sig	Ket
<i>Constanta</i>		10,151			
Pendapatan Pajak Daerah		0,128	3,589	0,000	H1 diterima
Pendapatan Retribusi Daerah		0,037	0,809	0,419	H2 ditolak
Dana Alokasi Khusus		-0,154	-5,680	0,000	H3 diterima
Belanja Modal		-0,071	-1,560	0,120	H4 ditolak
Penerimaan Pembiayaan		0,676	17,644	0,000	H5 diterima
$R^2 = 0,591$			F <sub>hitung</sub> =	111,528	
Adjusted $R^2 = 0,586$			Sig =	0,000	
Sumber: Hasil olah data, 2019					

Model dari penelitian ini adalah:

$$SLP = 10,151 + 0,128 + 0,037 - 0,154 - 0,071 + 0,676 + \varepsilon$$

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pendapatan pajak daerah sebesar  $3,589 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ ,

sehingga **H<sub>1</sub> diterima** yang artinya pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Pendapatan (yang salah satu komponennya adalah PAD) berpengaruh terhadap SILPA karena terjadi pelampauan atas target pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah jika menunjukkan perubahan-perubahan baik peningkatan maupun penurunan akan berkontribusi terhadap peningkatan maupun penurunan SILPA. Jika berbicara mengenai data menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah cukup tinggi sehingga berkontribusi cukup besar terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila pendapatan pajak ini tinggi maka akan berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran, yang mana jika pendapatan pajak daerah tinggi maka sisa lebih pembiayaan anggaran juga akan tinggi maupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015), Suharna (2015), dan Iswari (2018) bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

### 3.2.2 Pengaruh Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pendapatan retribusi daerah sebesar  $0,809 < 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,419 > 5\%$ , sehingga **H<sub>2</sub> ditolak** yang artinya pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal ini dikarenakan pendapatan retribusi daerah memiliki peran yang sangat kecil dalam menyusun anggaran belanja daerah. Dikarenakan kontribusinya yang sangat kecil maka tidak mampu untuk menopang hampir segala kebutuhan dalam anggaran pembelanjaan daerah itu sendiri. Sisa lebih pembiayaan ini cenderung mempunyai angka yang lebih besar daripada total keseluruhan kontribusi pendapatan retribusi daerah. Oleh karena itu pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan karena hanya memiliki kontribusi yang sangat kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intani (2018) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

### 3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel  $t$  hitung untuk dana alokasi khusus sebesar  $-5,860 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$  sehingga **H<sub>3</sub> diterima** yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin besar realisasi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat pencairan anggaran daerah semakin tinggi sehingga sisa lebih pembiayaan anggarannya kecil, sebaliknya semakin kecil realisasi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah maka tingkat pencairan anggaran rendah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran akan semakin besar. Realisasi dana alokasi khusus yang besar disebabkan karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2015) dan Sudarwadi (2015) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

### 3.2.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel  $t$  hitung untuk variabel belanja modal sebesar  $-1,560 < 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,120 > 5\%$ , sehingga **H<sub>4</sub> ditolak** yang artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dimana semakin besar Belanja modal terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun begitu juga, sebaliknya semakin kecil Belanja

Modal yang terealisasi maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun akan besar walaupun Pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Namun, banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishwahyudin (2016) bahwa belanja modal tidak berpengaruh negatif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

### 3.2.5 Pengaruh Penerimaan Pembiayaan Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan uji  $t$  yang dilakukan memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  penerimaan pembiayaan sebesar  $17,647 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 > 5\%$ , sehingga  **$H_5$  diterima** yang artinya penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan menambah atau mengurangi saldo SiLPA pada tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiana, Andy (2018) yang menyatakan bahwa Perubahan Pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap SiLPA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiana, Andy (2018) bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran se- Jawa tahun 2014-2017, dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Nilai  $t$  hitung untuk variabel pendapatan pajak daerah sebesar  $3,589 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga **H<sub>1</sub> diterima** yang artinya pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.
- 2) Hasil  $t$  hitung untuk variabel pendapatan retribusi daerah sebesar  $0,809 < 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,419 > 5\%$ , sehingga **H<sub>2</sub> ditolak** yang artinya pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.
- 3) Hasil  $t$  hitung untuk variabel dana alokasi khusus sebesar  $-5,860 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$  sehingga **H<sub>3</sub> diterima** yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.
- 4) Hasil  $t$  hitung untuk variabel belanja modal sebesar  $-1,560 < 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,120 > 5\%$ , sehingga **H<sub>4</sub> ditolak** yang artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.
- 5) Hasil  $t$  hitung untuk variabel penerimaan pembiayaan sebesar  $17,647 > 1,97190$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga **H<sub>5</sub> diterima** yang artinya penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.
- 6) Hasil perhitungan untuk nilai analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,586. Hal ini berarti bahwa 58,60% variasi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran yang dijelaskan oleh variabel dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan. Sementara sisanya 41,40% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk

dalam observasi penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian *goodness-fit*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Bawono, A. D. B. 2008. Keadilan Prosedural Dalam Hubungan Antara Budgetary Goal Characteristics Dan Kinerja Manajerial Pejabat Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 151-161.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivari-ate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hardiana A. Bawono. 2018. “Pengaruh Perubahan Pendapatan, Realisasi Dana Alokasi Khusus Dan Perubahan Pembiayaan Terhadap SILPA”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ida Ayu Gede Sutha Megasari, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
- Imam Ghozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Empat). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Izudin, H., Syaparudin., Dan M. Syamsudin. H. 2013. “Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No.1.
- Kamelia M. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor”. *Thesis*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.



- Kurniawan, A. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung. Alfabeta.
- Kusnandar, dan D. Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Uni-versitas Indonesia*.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta, Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ramadhan, M.F.A. 2015. "Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran dan Temuan Audit Terhadap SiLPA Pemerintah Daerah di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ratna I. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 18, No. 2 Juli Desember 2015.
- Sugiantini, N.L.A. 2015. "Kecenderungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume: 5. Nomor. 1 Tahun 2015.
- Suharna, I. 2015. "Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 s.d. 2013". *Tesis*. Universitas Gajdah Mada. Yogyakarta.
- Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

UU No 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Winarni, N.S. 2013. “Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kota Tarakan”. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.